

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa LSM sebagai kekuatan politik lemah dalam mengawal kasus korupsi. Berdasarkan asumsi awal kuatnya LSM dalam melakukan pengawalan terhadap kasus korupsi tidak terlepas dari keterlibatan banyak komponen yang ikut bergabung didalamnya yang menjalankan fungsinya masing-masing. Apabila LSM bersatu membentuk sebuah koalisi maka akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar yang mampu menjadi penyeimbang elit dalam suatu negara.

FPSB merupakan wadah gerakan yang kuat, baik secara massa strategi maupun keilmuan. Gabungan dari keseluruhan komponen Masyarakat dan tindakan tersebut membuka harapan bagi masyarakat untuk mengungkapkan penyimpangan anggaran yang terjadi di DPRD Sumbar, bahkan dalam perkembangannya sampai pada proses memidanakan anggota dewan.

Lemahnya kondisinya penegakan hukum berbarengan dengan melemahnya fungsi LSM di Sumatera Barat dalam mengawal kasus korupsi tentu menjadi hal yang sangat perlu kita khawatirkan secara bersama. Hal ini ditandai dengan banyaknya terjadi terdakwa yang bebas dari tindakan hukum.

Kurangnya peran serta LSM dalam mengawasi penegakan hukum, Lembaga Hukum dan mengawasi kinerja kejaksaan dalam proses mengadili terpidana korupsi. LSM sebagai aktor geraka sosial tidak ada membangun gerakan

yang berkelanjutan dalam memantau perkembangan proses penyidikan dan penyelidikan oleh kejaksaan dan penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya solidaritas antar LSM dan pegiat anti korupsi sebagai wadah masyarakat dalam mengawal kasus korupsi.

Melemahnya pengawasan yang dilakukan LSM dikarenakan beberapa faktor. Pertama. Kurangnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh LSM untuk melakukan advokasi dan peninjauan terhadap kasus, hal ini dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk ikut dan bergabung dalam LSM. Kedua. Adanya konflik perbedaan pendapat dan ketidak sepemahaman dalam melakukan konsolidasi yang mengakibatkan beberapa LSM tidak tertarik untuk ikut dalam gerakan yang mengakibatkan terganggunya solidaritas LSM dalam membangun koalisi. dan konflik yang terjadi mengakibatkan melemahnya gerakan karena konflik terjadi secara negatif yang memperlemah kerangka masyarakat.

B. Saran

Untuk sebuah perubahan yang diharapkan tentunya kita tidak bisa hanya mengharapkan lembaga hukum atau LSM saja dalam melakukan pengawasan terhadap kasus korupsi yang terjadi, apa lagi dengan kondisi dan perilaku politik LSM yang selalu berubah-ubah dan selalu dibayang-bayangi oleh tekanan politik baik dari dalam maupun dari luar LSM itu sendiri. Kesadaran segala pihak dalam mengawasi kasus korupsi dengan kritikan yang mengingatkan dan dukungan dalam upaya respon terhadap perilaku korupsi dan kebijakan terhadap pemberantasan korupsi sangat diperlukan. Hanya saja jangan sampai kemudian

apa yang mereka lakukan menyimpang dari cita-cita gerakan anti korupsi sebagai gerakan pembaharu bangsa yang bebas dari korupsi.

LSM dan Masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam proses demokratisasi karena masyarakat sipil merupakan pilar dari demokrasi. Sehingga Keterlibatan LSM dan masyarakat sipil satu sama lain akan menjadi kekuatan tersendiri. Dengan peranan masing-masing inilah yang akan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Sumatera Barat dalam mengawal kasus korupsi yang terjadi. Maka masyarakat sipil sebaiknya menyatukan sikap dan melepaskan sekat-sekat pembatas yang pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan dan tidak samanya ruang gerak dalam mencapai tujuan bersama yang memerlukan diadakannya konsolidasi. Dari hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan dilakukan penguatan dalam proses konsolidasi yang tidak hanya dilakukan ketika adanya isu panas saja tetapi konsolidasi yang berkelanjutan, sampai isu itu bergulir dan terselesaikan.

Terjadinya kesalahan dan konflik yang mengakibatkan perpecahan diantara aktivis anti korupsi seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga dan menjadi bahan pertimbangan bagi aktivis anti korupsi dalam melakukan pengawasan terhadap kasus korupsi. LSM dan gerakan anti korupsi harus diisi oleh orang-orang yang bebas kepentingan dan yang tidak mengkhianati tujuan pemberantasan korupsi. Sehingga mereka yang telah aktif dalam gerakan anti korupsi dan yang aktif di LSM dan organisasi adalah modal kader dalam melanjutkan gerakan anti korupsi untuk kedepannya.

Penegak hukum harus lebih serius dan cekatan lagi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para tersangka korupsi, dan benar-benar menegakkan hukum secara tegas, adil dan transparan, sehingga untuk selanjutnya tidak ada lagi terpidana korupsi yang bebas dari tahanan. Dalam mendukung tercapainya proses hukum yang tegas dan adil, sangat diharapkan kepada LSM untuk ikut dalam mengawasi kinerja penegak hukum. Untuk melakukan pengawasan tentunya sangat diperlukan solidaritas dan semangat anti korupsi yang kuat dari setiap elemen masyarakat, seperti Akademisi (Dosen, Mahasiswa) dari setiap bidang ilmu, dan seluruh masyarakat dari setiap kalangan, dan tentunya dukungan dari pemerintah sendiri.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak terlihatnya secara komprehensif gerakan LSM dalam melakukan advokasi dan pengawalan terhadap kasus korupsi yang terjadi, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih membuktikan proses pengawalan atau gerakan yang dilakukan oleh LSM dan mengkaji gerakan LSM dalam menjalankan fungsinya sebagai kekuatan politik dalam mengawal kasus korupsi secara komprehensif. Dalam penelitian ini tentunya terdapat banyak ketimpangan dan ketidaksesuaian dalam penulisan, maka dari itu sangat disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat lebih rinci lagi persoalan yang diteliti.